

Analisis Kebijakan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) untuk sektor Pertanian di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Indah Hermiati

Fakultas Fisip, Universitas Diponegoro
Email : indahhermiati20@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research is related to the development policy of the Independent Integrated City (KTM) for the agricultural sector in the Regency. Banyuasin, South Sumatra. Telang KTM in Banyuasin Regency, South Sumatra regarding leakage of the region can occur at the Telang KTM in Banyuasin District, South Sumatra. The research method uses descriptive qualitative which is intended to describe people's behavior, field activities, and certain trapped and deep activities. The Telang KTM in Banyuasin Regency is not in accordance with the objectives of the policy and does not set goals in the development of the Telang KTM because the location of the trade center such as the KTM Telang market center is quite difficult to reach by rural communities. Difficulties in marketing agricultural products or crops due to limited access. Telang KTM which is quite difficult to reach by rural communities. Leakage occurred in areas (leakage) where the marketing of agricultural products directly outside the area Demand for Telang KTM products was still limited. As a result of the loss of territory because of the many farmers who sell agricultural goods out of the regions and cities.

Keywords

Policy, Independent Integrated City, Agricultural Sector

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan Perencanaan Pembangunan di daerah bertujuan agar terciptanya perubahan kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan berpegang pada asas prioritas (Riyadi dan Supriyadi, 2005). Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan manifestasi untuk perkembangan suatu kota. Adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah di kawasan tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar maupun transmigran. Tujuan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis pada kawasan yang memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang melalui pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dan daerah sekitarnya. dalam Undang-Undang No.15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dengan perkembangan dinamika diubah dengan Undang-Undang No.29 tahun 2009 pasal 1, menyebutkan Wilayah Pembangunan Parsial atau WPT terdiri dari beberapa SKP, dimana dalam satu SKP direncanakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan baru.

Dalam pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi memiliki banyak hambatan serta tantangan di berbagai sektor pada beberapa lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), sehingga dalam perkembangannya Kementrian Desa (KEMENDES) mengambil langkah strategis dalam mendukung dan mengembangkan program – program transmigrasi di daerah, dengan melaksanakan program yang disebut Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah area transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang secara holistik dan komprehensif, dengan ruang lingkup pengembangan di semua bidang (Najiyati dan Susilo, 2011). Diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. Kep.220/MEN/V/ 2007 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu



Mandiri (KTM). Salah satu KTM yang telah dibangun adalah KTM Telang di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Lokasi pemukiman transmigrasi di kawasan KTM Telang dibangun pada 1978 - 1982, yang mencakup transmigrasi dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, dan Bali. Dengan populasi KTM Telang sebanyak 16.949 rumah tangga atau 113.142 orang (Faranita et al, 2017).

KTM adalah desa atau wilayah yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat pengumpulan, pemrosesan, distribusi, dan layanan pengembangan transmigran yang dirancang sebagai arah pengembangan terstruktur unit pemukiman transmigrasi dan desa-desa di sekitarnya dalam jaringan infrastruktur tunggal dan regional (Adriani et al, 2018). Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Program transmigrasi bertujuan untuk memindahkan jutaan orang dari Jawa, Bali dan Madura ke pulau-pulau berpenduduk jarang dan untuk memungkinkan pemerataan penduduk Indonesia. Transmigrasi juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan lahan dan peluang kerja bagi masyarakat miskin dan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan. Namun, tanah dan air di lokasi transmigrasi umumnya tidak subur sehingga akan mempengaruhi pendapatan petani dan kehidupan petani secara keseluruhan (Wildayana *et al.*, 2017). Pertanian di Kab. Banyuasin dikenal sebagai lumbung padi Sumatera Selatan dan penyumbang 1,4 juta ton beras untuk Sumatera Selatan dan terus ditingkatkan.

KTM Telang adalah program pemerintah yang merupakan salah satu konsep perkotaan dan pertumbuhan baru pada kawasan transmigrasi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dibangunnya KTM Telang adalah untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi pedesaan (kawasan *hinterland*) dan meningkatkan pendapat daerah dengan cara menjadikan KTM Telang sebagai pusat untuk Kawasan *hinterland* yang merupakan kawasan belakang yang berperan sebagai pusat produksi. Keterkaitan antara KTM Telang dengan *hinterland* nya sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional (2010-2014) menyebutkan bahwa salah satu isu strategis dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah lemahnya keterkaitan ekonomi antar daerah serta antara pusat produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Lemahnya keterkaitan ekonomi antara daerah pusat dan *hinterland* memperbesar terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakage*), sehingga salah satu upaya mengurangi terjadinya kebocoran wilayah adalah dengan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (*hinterland*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan pembangunan KTM Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bagaimana kebocoran wilayah dapat terjadi pada KTM Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Islamy, 2000) kebijakan publik adalah *Is whatever governments choose to do or not to do* "tindakan yang dilakukan atau atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut (Winarno Budi, 2008). Kebijakan publik bukan hanya apa yang dilakukan tapi, yang tidak dilakukan pemerintah juga dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut kamus Oxford Advanced Learner's (1995) to implemet (mengimplementasikan) berarti to put something into result (melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dampak) to carry something out (melakukan sesuatu). James Anderson (dalam Islamy, 2000) berpendapat kebijakan adalah rangkaian tindakan yang dibuktikan dilapangan melalui implementasi. Suatu kebijakan publik dinilai berhasil atau gagal terlihat dari implementasinya di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dalam Persons (1995) dan wibawa, dkk., (1994) Implementasi kebijakan dilakukan baik oleh organisasi pemerintah, non pemerintah secara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan.

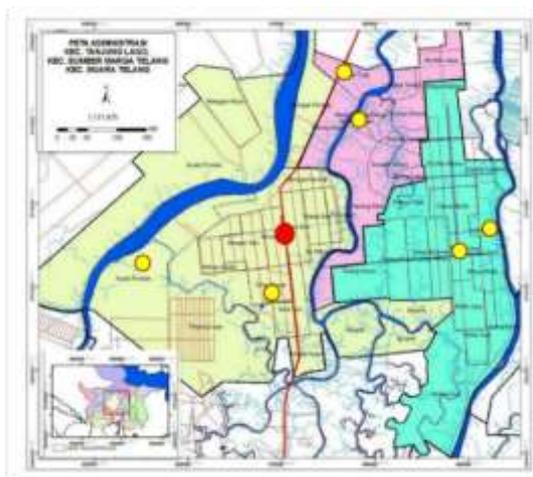
Grindel berpendapat implementasi dapat berjalan jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, program telah tersusun dan dana untuk merealisasinya telah siap dan disalurkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Grindel: 1980). Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle yaitu "*Implementation as a Political and Administrative Process*" keberhasilan suatu kebijakan publik terlihat dari proses implementasinya.

Berjalan atau dapat teralisasi suatu kebijakan publik sesuai dengan tujuan dilapangan yaitu melalui implementasi. Singkatnya implementasi adalah sebuah proses dalam mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dalam upaya mewujudkan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor (1999), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah KTM dan Keputusan Bupati Nomor 341 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penentuan KTM Lokasi Telang Pusat Desa Mulya Sari, Kabupaten Tanjung Lago yang menetapkan KTM Telang yang lebih rendah, yang meliputi tiga kecamatan, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Muara Telang, dan Kecamatan Sumber Marga Telang.



Catatan:
Kriteria untuk desa
terpilih:

1. Ketersediaan infrastruktur,
2. Komoditas utama,
3. Moda transportasi,
4. Aktivitas pasar

● Pusat KTM Telang
● Desa *Hinterland*

Gambar 1. Lokasi penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data ini meliputi informasi tentang luas lahan petani, produksi padi, harga padi, pemasaran hasil panen, rantai pasar dari komoditi padi serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasar padi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (kuesioner). Metode pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah pengumpulan data primer dan data sekunder. Menurut Bogdan dan Taylor (1999), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jawaban responden dalam wawancara dengan menggunakan kuisisioner akan dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan pengamatan, pengetahuan dan tanggapan responden terhadap fakta di lapangan terkait indikasi kebocoran wilayah. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan di narasikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fakta dan keadaan di lapangan secara obyektif dan apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi KTM Telang

KTM merupakan sebuah program pemerintah yang dirancang secara holistik dan komprehensif, yang bertujuan membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan, sebagai akselerasi pengembangan perekonomian pedesaan dan terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mandiri. KTM adalah desa atau kawasan yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat koleksi (pengumpulan hasil), pengolahan hasil, distribusi dan jasa dari wilayah pengembangan transmigran yang didesain sebagai arahan pengembangan terstruktur dari unit-unit pemukiman transmigrasi dan desa-desa sekitar dalam satu satuan jaringan infrastruktur dan satuan ekonomi wilayah (Kalsum dan Caesariadi, 2016). Tujuan pemerintah dalam program pembangunan KTM Telang khususnya pada sektor pertanian karena Kab. Banyuasin merupakan lubang padinya Sumatera Selatan.

Kawasan KTM Telang telah dilegalisasikan secara hukum melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 22 Tahun 2009 tentang penetapan kawasan dan *Masterplan* KTM Telang yang terintegrasi dalam kawasan

strategis kabupaten (KSK) dan penetapan Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi. Fungsi perkotaan dimaksud antara lain meliputi sebagai:

1. Pusat kegiatan agribisnis mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi barang produksi dan atau barang konsumsi, pusat pelayanan agroindustri khusus (*special agroindustry services*) dan pemuliaan tanaman unggul, sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri, dan jasa.
2. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya lembaga keuangan pasar, pasar grosir dan pergudangan.

Kawasan belakang atau yang sering disebut *hinterland* merupakan daerah yang berfungsi untuk memenuhi atau memasok kebutuhan pangan atau kebutuhan bahan makanan pokok seperti padi, buah-buahan, jagung serta palawija. Daerah *Hinterland* yang saling memiliki interaksi antar satu sama lain memiliki fungsi yang sangat penting. Menurut Bintarto Fungsi Daerah *Hinterland* sebagai berikut:

- a. Dalam interaksi desa-kota, *Hinterland* berfungsi sebagai daerah dukung (*hinterland*) atau daerah penuplai bahan makanan pokok, seperti padi, jagung, ketela, kacang, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging hewan.
- b. Daerah *Hinterland* berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) ditinjau dari sisi potensi ekonomi.
- c. Dari sisi kegiatan kerja (*occupation*), daerah *hinterland* dapat berfungsi sebagai desa agraris, desa manufaktur, desa industri dan desa nelayan.

Peraturan-peraturan pemerintah tentang KPB/KTM Telang yang mendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. Kep.220/MEN/V/2007 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. Kepmen No. 214/MEN/V/2007, tanggal 07 Mei Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 22 tahun 2008, tentang pembentukan Kawasan KTM.
4. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 341 tahun 2008, tanggal 17 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi Pusat KTM Telang Desa Mulya Sari Kecamatan tanjung Lago.
5. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 227 tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007 Tentang pembentukan POKJA KTM Telang.

Pembangunan perekonomian wilayah tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Dalam Kep.220/MEN/V/2007 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pemerintah harus memperhatikan lokasi dalam pembangunan KTM Telang agar tujuan dari sebuah peraturan dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Tetapi pada implementasi pembangunan KTM Telang permasalahan tersebut sering kali muncul sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kawasan KTM Telang:

1. Kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian atau hasil panen di karenakan akses yang terbatas.
2. Letak pusat perdagangan seperti pusat pasar KTM Telang yang cukup sulit di jangkau oleh masyarakat *hinterland*.
3. Terjadinya kebocoran wilayah (*leakage*) dimana pemasaran hasil pertanian langsung ke luar daerah.
4. Pemasaran produk-produk KTM Telang masih terbatas pada *offline* sehingga pemasarannya masih terbatas di sekitar daerah KTM Telang.

Tujuan dibangunnya KTM Telang adalah untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi pedesaan (kawasan *hinterland*). Kawasan *hinterland* merupakan kawasan belakang yang berperan sebagai pusat produksi. Keterkaitan antara KTM Telang dengan *hinterland*nya sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional (2010-2014) menyebutkan bahwa salah satu isu strategis dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah lemahnya keterkaitan ekonomi antar daerah serta antara pusat produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Lemahnya keterkaitan ekonomi antara daerah pusat dan *hinterland* memperbesar terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakage*), sehingga salah satu upaya mengurangi terjadinya kebocoran wilayah adalah dengan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (*hinterland*).

Aktivitas pengeluaran/penerimaan wilayah yang tidak meningkatkan tambahan pendapatan suatu wilayah, atau dengan kata lain kebocoran wilayah dimana kondisi terjadinya aliran nilai tambah ke wilayah lainnya karena adanya potensi nilai tambah yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menyebabkan kecilnya *multiplier* yang dapat ditimbulkan dari suatu kegiatan ekonomi di wilayah dan salah

satu penyebab kurangnya perhatian dari pemerintah. Rantai pemasaran komoditi padi di Kawasan KTM Telang adalah sebagai berikut:

Petani — Pengumpul kecil — Pengumpul besar — Penampung — Konsumen

Pembangunan KTM Telang ini diperuntukan pemerintah terutama pada sektor pertanian yang merupakan penghasilan utama Kab. Banyuasin. Petani sebagai produsen pertama di dalam rantai pemasaran menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering panen kepada pengumpul kecil dengan harga 4.500/kg. Pengumpul kecil biasanya mendatangi sawah-sawah milik petani ketika musim panen. Salah seorang petani yang kami wawancarai bernama Abdul Rahman mengatakan bahwa:

"Biasanya pengumpul langsung datang ke sawah menawarkan harga jual gabah dengan membawa timbangan dan uang tunai. Kesepakatan dan transaksi antara petani dan tengkulak terjadi di sawah dan cukup sampai disitu, Setelah itu kami tidak tahu mau kemana gabah itu dijual dan berapa harga gabah tersebut dijual kembali. Harga mereka (tengkulak) yang ditentukan".

Pembelian gabah dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dengan beli langsung. Pembelian secara langsung dilakukan pengumpul secara acak kepada petani yang ingin menjual hasil panennya. Sedangkan pembelian berdasarkan kesepakatan terjadi ketika petani meminjam modal dalam bentuk saprodi kepada pengumpul atau tengkulak sehingga ketika panen petani harus menjual gabahnya kepada tengkulak yang bersangkutan.

Gabah tersebut kemudian dibawa oleh pengumpul kecil ke tepi parit dengan menggunakan sistem *Manol*. *Manol* merupakan suatu tradisi panen dimana remaja-remaja sekolah tingkat atas atau menengah akan mengangkut gabah milik petani dari sawah ke tepi parit dengan menggunakan sepeda motor. Satu karung gabah dihargai Rp. 3000/karung (1 karung 70 kg) oleh tengkulak, dalam sehari para remaja tersebut bisa mengumpulkan Rp. 200.000-250.000 per hari dari kegiatan *Manol* tersebut. Uniknya ketika musim panen tiba, para guru banyak kehilangan murid-muridnya karena para murid melakukan kegiatan *Manol*. Salah seorang pengumpul kecil yang kami wawancarai bernama Suroso mengatakan bahwa:

"Penentuan harga ditentukan oleh pengumpul besar, mekanisme pembelian dengan sistem ijon atau kesepakatan terlebih dahulu karena petani pada awalnya meminjam modal sehingga hasil panennya harus dijual kepada kami. Untuk harga gabah tergantung letak sawah petani, jika jaraknya jauh dan masuk kedalam selisih harga Rp. 100-200/kg, tergantung jalannya rusak atau tidak. Kendala yang kami hadapi seperti cuaca apalagi jika musim hujan dan buruknya jalan yang dilewati, karena hal itu akan mempengaruhi harga.

Tengkulak kecil kemudian membawa gabah tersebut kepada pengumpul besar dan dijual dengan harga 4.700/kg. Pengumpul besar kemudian meneruskan kepada penampung dalam bentuk gabah atau beras dengan menggunakan angkutan sungai yaitu kapal tongkang. Pengumpul besar yang menjual dalam bentuk beras biasanya memiliki usaha penggilingan padi sehingga harga beras yang dijual kepada penampung sebesar 7.700/kg. Sedangkan jika dijual dalam bentuk gabah pengumpul besar menjual ke penampung sebesar 5.100/kg.

Pengumpul besar membawa ke penampung yang terletak di Gasing dengan menggunakan kapal tongkang dengan muatan 60-100 ton per sekali angkut. Adapun biaya angkut yang harus dikeluarkan pengumpul besar sebesar Rp. 100/kg. Menurut salah seorang pengumpul besar yang bernama Romli dari Desa Telang Jaya, Kecamatan Muara Telang bahwa:

"Gabah tersebut dibawa ke penampung di Gasing yang bernama Lim-lim yang merupakan pemilik PT. Buyung Putra Pangan, gabah yang dijual seharga 5.100/kg. Kendala dalam pendistribusian beras tersebut adalah cuaca karena jika hari sering hujan maka gabah dalam karung akan lembab dan kualitasnya akan semakin berkurang. Untuk harga sendiri ditentukan oleh penampung".

Salah satu kendala lain dalam pemasaran gabah adalah ketika hari-hari besar china seperti perayaan Imlek, dimana harga gabah akan turun sebesar Rp. 100-150/kg seminggu sebelum hari Imlek. Hal itu disebabkan karena gudang-gudang milik china tutup, sehingga petani harus menjual padi nya meskipun dengan harga murah, karena jika tidak dijual pada saat ini maka gabah akan lebih lama dalam karung dan menurunkan kualitasnya.

Gabah yang telah sampai ke Gasing di PT. Buyung Putra Pangan kemudian diproses menjadi beras. Produksi beras per harinya adalah 250 ton/hari. Beras yang dikeluarkan terdiri dari tiga brand yaitu Topi Koki, Arjuna, dan Belido. Harga beras yang dijual dalam kemasan 5 kg, 10 kg dan 20 kg dengan harga Rp. 100.000/10kg dan 200.000/20kg atau Rp. 10.000/kg. Penentuan harga ditentukan oleh bos besar. Salah seorang karyawan di PT. Buyung Putra Pangan yang bernama Beni mengatakan bahwa:

"Beras tersebut kemudian dipasarkan ke luar Provinsi Sumsel yaitu Pekan Baru, Jambi, dan Jakarta. Sistem pemasaran beras tersebut berdasarkan sistem orderan, dimana para pedagang dari luar Sumsel tersebut sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan pihak PT sehingga ketika musim panen tiba, para pedagang lah yang langsung datang ke Gasing, Banyuasin untuk mengambil beras tersebut. Angkutan yang digunakan oleh pedagang dari luar daerah tersebut dengan menggunakan Truk Fuso sebanyak 5-7 unit setiap harinya. Sedangkan untuk wilayah Palembang hanya sedikit yang kita pasarkan dengan persentase 15% Palembang dan 85% luar Palembang".

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden yang terlibat dalam rantai pasar komoditi padi dapat disimpulkan bahwa lemahnya keterkaitan antara daerah pusat (Pusat KTM) dan daerah belakang (Kawasan *hinterland*) mendorong terjadinya kebocoran wilayah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 bahwa daerah *hinterland* berperan sebagai daerah belakang berperan dalam memasok barang-barang produksi seperti hasil pertanian dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Dalam hal ini daerah *hinterland* seharusnya menjual hasil panen padi ke pusat KTM Telang. Pusat KTM seharusnya menjadi pusat pengolahan hasil pertanian menjadi barang produksi dan atau barang konsumsi sesuai dengan tujuan pemerintah, dalam hal ini sebagai pusat pengumpulan hasil panen petani yang kemudian akan di olah menjadi beras dengan menggunakan alat penggilingan padi atau *rice milling unit* yang terdapat di pusat KTM Telang. Padi yang sudah menjadi beras selanjutnya akan didistribusikan ke daerah-daerah lain.

Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dengan rencana awal pemerintah terkait kebijakan keterkaitan KTM Telang dan daerah *hinterland*. Dimana petani di daerah *hinterland* tidak menjual hasil panennya ke pusat KTM Telang, melainkan langsung dijual ke luar daerah seperti Jambi, Lampung, dan Pulau Jawa. Salah arahnya pergerakan ekonomi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terjadinya kebocoran wilayah tersebut justru menurunkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tanggapan responden terkait kebocoran wilayah dalam sektor pertanian khususnya komoditi padi di Kawasan KTM Telang Kabupaten Banyuasin disebabkan karena berbagai faktor antara lain:

1. Lemahnya kebijakan dari pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan distribusi hasil panen petani.
2. Tidak sesuai sasaran/implementasi dilapangan dalam pembangunan KTM Telang karena lokasi pembangunan jauh dari wilayah *Hinterland*.
3. Tidak adanya lembaga pemerintah yang mengayomi petani dalam pengelolaan hasil panen.
4. Banyaknya tengkulak yang mengambil alih hasil panen petani.
5. Aksesibilitas fisik yang tidak memadai bagi petani *hinterland* untuk menuju pusat KTM. Selain aksesibilitas/pencapaian ke KPB/KTM Telang, perlu diperhatikan juga aksesibilitas internal kawasan utamanya dari Pusat KPB/KTM ke pusat-pusat SKP maupun antar desa ke Pusat SKP atau bahkan dari desa-desa ke Pusat KPB/KTM. Masyarakat kawasan KPB/KTM Telang sangat mengandalkan akses jalan dan jembatan sebagai prasarana untuk distribusi kebutuhan maupun hasil bumi mereka, sehingga secara umum pergerakan perekonomian masyarakat ataupun distribusi kebutuhan dan hasil bumi masyarakat sangat tergantung pada kondisi prasarana yang ada dan kelancaran atau kemudahan aksesibilitas didalam kawasan.
6. Kurangnya infrastruktur pengolahan hasil panen (*Rice Milling Unit*) yang tersedia di pusat KTM.

Pengembangan kawasan tidak terlepas dari adanya peran barang dan jasa yang masuk dan keluar. Melihat kondisi eksisting dilapangan, hubungan yang terjalin antara pusat KTM dengan wilayah *Hinterland* dalam aktifitas ekonomi maupun sosial memang sangat lemah, dimana terdapat banyak sekali *leakage* (kebocoran) sehingga pusat KTM tidak mampu menyerap potensi yang ada dan sebaliknya pusat KTM pun tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah *Hinterland*. Beberapa titik kebocoran yang teridentifikasi yaitu melalui Desa Sri Tiga, Simpang PU (Desa Bunga Karang), Desa Gasing, Desa Kenten laut dan Kota Palembang.

Permasalahan umum yang banyak ditemui adalah banyaknya petani yang terlibat sistem ijon dengan para tengkulak. Patokan harga dari tengkulak tentu saja merugikan petani. Namun petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual ke tengkulak. Para tengkulak kemudian menjual padi tersebut ke daerah Gasing dan tidak ke KTM Telang. Alasannya kapasitas *Rice Milling Unit* (RMU) yang tersedia oleh pemerintah di KTM Telang belum memadai untuk melakukan pengolahan dari hasil panen padi petani dari wilayah *hinterland* dan hanya mampu menampung hasil panen petani yang berada di pusat KTM. Aliran hasil panen yang tidak melalui pusat KTM sebagaimana mestinya yang sesuai dengan rencana awal pemerintah dalam pembentukan KTM menimbulkan indikasi terjadinya kebocoran wilayah atau *leakage*.

KESIMPULAN

Dalam mengimplemtasikan program-program pemerintah harusnya pemerintah dapat melihat lokasi dan daerah yang menjadi sasaran dari program tersebut agar apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dengan implemtasinya berjalan sesuai yang diinginkan. Permasalahan – permasalahan yang timbul dari program pemerintah dalam pembangunan KTM Telang di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini dapat dihindarkan, seperti terjadinya kebocoran wilayah akibat tidak tepat sasaran pemerintah dalam pembangunan KTM Telang. Pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat di wilayah *Hinterland* dengan memberikan fasilitas dan akses agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau lokasi KTM Telang dan menyediakan alat-alat yang lengkap serta membentuk lembaga untuk mengayomi petani agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian petani sampai menjual ke tengkulak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani D., I Zahri, E Wildayana, Maryadi, M Hamzah and Yulius. 2018. Farmer's Welfare in Telang's Integrated Independent City: Lesson Learned from Migrant and Local Farmers in Tidal Land, South Sumatra. *International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security 122 (2018)* [online], 1-6.
- Anoesyirwan Moeins. 2014. *Akselarasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ktm Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol, 4 No.1.
- Bendavid, A. 2014. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Praeger Publisher, Westport USA.
- Faranita LF., MM Batubara and H. Iswarini. 2017. Correlation Between The Factors Attitude Forming with The Attitude Farmer Program Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP) in Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang of Tanjung Lago, Banyuasin. *Jurnal Societa*, [online], Vol. 6 No. 1, 23-29.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Header Akib, 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No. 1.
- Kalsum, E. dan Caesariadi, T.W. 2016. Konsep Permukiman Kota Terpadu Mandiri Langkau Botang. *Jurnal Arsitektur*, [online], 3, 12–24.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.
- Priyadi U dan E. Atmadji. 2017. Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* [online], Vol. 2 No. 2, 193-219.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali.
- Stimson, Robert jd. at.al. 2016. *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategi. Second Edition*. Australia: Springer.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet Ke-13, 2011.
- Rustiadi, Ernan et al. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Triutomo, S. 2013. *Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu*. BPPT. Jakarta.
- Wildayana E, Adriani, D and Armanto, ME. 2016. Livelihoods, Household Income and Indigenous Technology in South Sumatra Wetlands. *Sriwijaya Journal of Environment* [online], 2, 25-30.